

Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di Sumatera Selatan

Rika Henda Safitri^{1*}, Umi Kalsum², Trie Sartika Pratiwi³

^{1,2,3} Universitas Sriwijaya

rikahenda@unsri.ac.id¹, umikalsum@unsri.ac.id², trie.sartika@fe.unsri.ac.id³

*Corresponding Author

Diajukan : 2 Nopember 2022
Disetujui : 22 Nopember 2022
Dipublikasi : 1 January 2023

ABSTRACT

The purpose of this research is to understand how proxies of local government characteristics consisting of regional size, level of regional wealth, level of regional dependence and capital expenditure can affect local government performance. Then also to understand how accountability can affect local government performance. This study uses the entire local government population. The sample used in this study was selected using a purposive sampling method, namely 15 district/city local governments with an observation period of five years. The amount of data used in this study is as much as 75 data. The analysis technique in this study used panel data regression analysis. The results of the study explain that the size of the area, the level of regional wealth and capital expenditure have no influence on the performance of the regional government. The level of regional wealth and capital expenditure cannot affect the performance of the regional government. Meanwhile, the level of regional dependence and accountability has a positive influence on local government performance. The level of regional dependence and accountability can improve local government performance.

Keywords: characteristics of local governments, performance, accountability.

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam menjalankan otonomi daerah, dan juga mempunyai tanggungjawab kepada pemerintah pusat berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Tanggung jawab tersebut dilakukan dengan membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah atau LPPD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut, pemerintah daerah juga menyajikan dan mengumpulkan dua laporan lainnya, pertama Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu laporan yang memuat informasi terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam periode satu tahun, dan kedua adalah Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) Kepada Masyarakat yang merupakan suatu laporan tentang penyelenggaraan pemda pada periode 1 tahun anggaran sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah atau RKPD (Sudarsana dan Rahardjo, 2013).

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang telah diserahkan kepada pemerintah pusat, nantinya akan dievaluasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Tujuan dari evaluasi ialah untuk menilai kinerja dari pemerintah daerah sebagai salah

satu penyelenggara pemerintahan Republik Indonesia. Pengukuran terhadap kinerja pemerintah daerah dilakukan agar dapat digunakan dalam pengambilan keputusan sehingga menjadi sarana pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (Artha dan Basuki 2016).

Kinerja dari suatu pemerintahan erat kaitannya dengan akuntabilitas. Akuntabilitas itu sendiri dalam konteks pemerintah daerah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah daerah kepada masyarakat secara umum yang menyangkut seluruh proses pengelolaan anggaran baik dari awal perencanaan sampai ke teknis pelaksanaan. Dengan pertanggungjawaban tersebut pemerintah daerah secara langsung menunjukkan adanya ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan sehingga hal ini dapat mendorong adanya peningkatan kinerja pemerintah daerah (Wiguna, Yuniartha, dan Darmawan, 2015).

Selain itu, beberapa riset terdahulu, Sudarsana dan Rahardjo (2013) menyatakan bahwa karakteristik pemerintah daerah pada proksi ukuran daerah, tingkat ketergantungan daerah dan belanja modal tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja pemda kabupaten/kota seluruh Indonesia, pada proksi tingkat kekayaan daerah memiliki pengaruh yang positif secara signifikan terhadap pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia dan temuan audit BPK berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kinerja pemda kabupaten/kota di Indonesia. Sedangkan (Artha dan Basuki 2016) memperlihatkan hasil bahwa karakteristik pemerintah pada proksi ukuran daerah memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemda kabupaten/kota pada Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian penelitian Wiguna, Yuniartha, dan Darmawan. (2015) mengungkapkan pula bahwa pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Dari beberapa penelitian yakni, Sudarsana, dan Rahardjo (2013), Afrian, Surya, dan Silfi (2016), Amyulianthy, Khair, dan Lysandra (2016), Dewata, Jauhari, Aprianti, dan Hijria (2018), Utama, Fikri, Evana, dan Gamayuni (2019), Andani, Sarwani, dan Respati, (2019), Aminah, Afiah dan Pratama (2019), mengungkapkan bahwa variabel yang ada dalam karakteristik pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Sedangkan beberapa penelitian lainnya mengungkapkan ada beberapa variabel yang tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah yakni Harumiati dan Payamta, (2014), pada variabel ukuran daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat serta status daerah, Qowi dan Tri (2017) pada variabel tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, belanja modal daerah dan temuan pemeriksaan BPK, dan Utama, Fikri, Evana, dan Gamayuni (2019) pada variabel tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan dengan pusat dan belanja modal.

Sebelumnya peneliti (Safitri, Nurullah dan Burhanudin 2021) telah melakukan riset tentang pengaruh opini audit terhadap kinerja pemerintah daerah Sumatera Selatan di tahun 2017-2018. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa kinerja pemerintah daerah dipengaruhi oleh opini audit. Sedangkan pada riset ini peneliti ingin menambah beberapa variabel dan memperluas tahun penelitian dari penelitian sebelumnya.

STUDI LITERATUR

Teori *Steawarship*

Menurut Donaldson dan Davis (1991) seperti yang dikutip Nosihara dan Rizal (2016), teori *steawarship* merupakan gambaran situasi dimana manajemen tidak termotivasi dengan tujuan-tujuan individu, akan tetapi lebih termotivasi untuk tujuan kepentingan organisasi. Hubungan teori *steawarship* dengan pemerintah daerah adalah teori *steawarship* memandang bahwa pemerintah daerah sebagai lembaga negara yang dipercaya dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan tepat serta dapat bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga kinerja pemerintah daerah dapat berjalan dengan baik (Ara, Herwanti, dan Pituringsih (2016).

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) merupakan suatu rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dengan cara menilai capaian kinerja pemerintah daerah menggunakan indikator kinerja makro LPPD. EKPP juga dapat diartikan sebagai suatu proses pengumpulan data yang nantinya akan dianalisis secara sistematis berhubungan dengan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah menggunakan sistem pengukuran kinerja yang ada (Safitri dan Aulia 2017).

Karakteristik Pemerintah Daerah

Karakteristik Pemerintah Daerah merupakan suatu ciri-ciri khusus yang menandai sebuah daerah dan mempunyai perbedaan dengan daerah yang lain (Andani, Sarwani, dan Respati, 2019).

Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut Bastian (2006) dalam jurnal Rizal, dan Prabowo (2017), kinerja merupakan suatu pencapaian administrasi suatu program atau kebijakan dalam merealisasikan sasaran, tujuan, misi dan visi suatu organisasi. Kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota dapat dilihat dari Laporan Hasil Evaluasi Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Peringkat kinerja pemerintah daerah ditentukan dari nilai yang didapat masing-masing daerah. Terdapat empat kategori dalam penilaian kinerja pemerintah daerah. Kategori penilaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 Kriteria Peringkat Kinerja Pemerintah Daerah

No	Nilai/Skor	Kategori
1.	0,00-0,99	Rendah
2.	1,00-1,99	Sedang
3.	2,00-2,99	Tinggi
4.	3,00-4,00	sangat tinggi

Sumber : (Harumiati dan Payamta, 2014)

Pengaruh Ukuran Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Ukuran daerah merupakan besar kecilnya suatu pemerintah daerah yang dibuktikan dari seberapa besar aset pemerintah daerah (Afrian, Surya, dan Silfi, 2016). Semakin besar ukuran daerah maka kegiatan operasional suatu daerah akan semakin mudah sehingga akan memberikan kelancaran dalam memperoleh pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah yang diperoleh oleh suatu daerah akan digunakan untuk kemajuan daerah sehingga dapat mendukung peningkatan kinerja pemerintah daerah (Maiyora, 2015). Pemerintah Daerah memerlukan sumber daya ekonomi dalam menjalankan suatu

program kerja. Semakin besar ukuran pemerintah daerah, maka pelayanan kepada masyarakat semakin besar. Dengan ukuran daerah yang besar, pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dibandingkan dengan pemerintah daerah yang ukurannya kecil. Dalam hal ini, ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Penelitian Andani, Sarwani, dan Respati (2019) membuktikan bahwa ukuran daerah berpengaruh positif terhadap pemerintah daerah. Sehingga peneliti mengajukan hipotesis

H₁ : Ukuran Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

Pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah terhadap Kinerja Pemda

Tingkat kekayaan daerah merupakan suatu kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhannya (Armaja, Ibrahim, dan Aliamin (2017)). Dalam memenuhi kebutuhannya, pemerintah daerah menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Menurut Mustika dalam jurnal Armaja, Ibrahim, dan Aliamin (2017) salah satu sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah adalah pendapatan asli daerah. Kekayaan suatu daerah dapat diukur berdasarkan pendapatan asli daerah. Semakin besar pendapatan asli daerah, maka pemerintah daerah diharapkan dapat mengelolanya dengan tepat sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Pengelolaan pendapatan asli daerah yang tepat dapat mendorong kinerja pemerintah daerah. Hal ini dibuktikan dari penelitian Sudarsana dan Rahardjo (2013) yang menunjukkan bahwa tingkat kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Mengacu pada penelitian sebelumnya, hipotesis yang akan digunakan pada penelitian ini adalah *H₂ : Tingkat Kekayaan Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.*

Pengaruh Tingkat Ketergantungan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Tingkat ketergantungan daerah merupakan hubungan ketergantungan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Tingkat ketergantungan daerah dapat dilihat dari dana alokasi umum. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan adanya alokasi dana tersebut, pemerintah pusat akan meninjau penggunaan dana alokasi umum sehingga memacu pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah (Noviyanti dan Kiswanto, 2017). Setiap daerah mempunyai perbedaan dalam ketergantungan terhadap pemerintah daerah. Semakin besar dana alokasi umum yang diterima pemerintah daerah, maka pemerintah pusat akan lebih memantau penggunaannya. Dengan keadaan ini, pemerintah daerah akan termotivasi untuk meningkatkan kinerja pemerintahannya. Penelitian dari Primadiva, Rosdini, dan Mulyani, (2021) dan Dewata, Jauhari, Aprianti, dan Hijria (2018) membuktikan bahwa tingkat kekayaan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan penelitian tersebut, maka hipotesis yang akan digunakan pada penelitian ini adalah *H₃ : Tingkat Ketergantungan Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.*

Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Belanja modal ialah belanja pemda yang kegunaannya lebih dari 1 tahun anggaran yang akan meningkatkan kekayaan daerah dan juga akan menambah jumlah belanja yang sifatnya rutin misalnya biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Semakin baik dampak pembangunan terhadap masyarakat, maka semakin tepat penggunaan belanja modal tersebut. Penggunaan belanja modal yang tepat dapat berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini dibuktikan dari penelitian Ara,

Herwanti, dan Pituringsih (2016) yang menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang akan digunakan pada penelitian ini adalah H_4 : *Belanja Modal Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*.

Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas dalam konteks pemerintah daerah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah daerah kepada masyarakat secara umum yang menyangkut seluruh proses pengelolaan anggaran baik dari awal perencanaan sampai ke teknis pelaksanaan (Wiguna, Yuniartha, dan Darmawan, 2015). Pengelolaan keuangan setiap daerah harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah daerah. Dengan adanya akuntabilitas ini, secara tidak langsung mendorong adanya peningkatan kinerja pemerintah daerah. Hal ini dibuktikan dari penelitian Wiguna, Yuniartha, dan Darmawan. (2015) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang akan digunakan pada penelitian ini adalah H_5 : *Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*.

METODE

Penelitian ini menggunakan populasi seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2016-2020. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini dipilih menggunakan metode *purposive sampling*, yakni 15 pemerintah daerah kabupaten/kota dengan periode pengamatan selama lima tahun. Jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 75 data yang merupakan data sekunder dengan sumber dari website Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Untuk definisi operasional penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2 Definisi Operasional

Variabel	Definisi	Indikator/Pengukuran
Ukuran daerah (X ₁)	besar kecilnya suatu pemerintah daerah yang dibuktikan dari seberapa besar aset pemerintah daerah (Afrian, 2016)	total aset pemerintah daerah. Harumiati dan Payamta (2014)
Tingkat kekayaan daerah (X ₂)	dinyatakan dengan membandingkan antara jumlah pendapatan asli daerah dengan total pendapatan daerah. Mengacu pada penelitian Qowi dan Prabowo (2017),	Tingkat Kekayaan Daerah = Pendapatan Asli Daerah/ Total Pendapatan Daerah
Tingkat ketergantungan daerah (X ₃)	merupakan perbandingan antara dana alokasi umum dengan total pendapatan daerah. Mengacu pada penelitian (Dewata, Jauhari, Aprianti, dan Hijria, 2018)	Tingkat Ketergantungan Daerah = Dana Alokasi Umum/Total Pendapatan Daerah
Belanja modal (X ₄)	merupakan perbandingan antara realisasi belanja modal dengan total realisasi belanja daerah. Mengacu pada penelitian Utama, Fikri, Evana, dan Gamayuni (2019)	Belanja Modal = Realisasi Belanja Modal/ Total Realisasi Belanja Daerah
Akuntabilitas (X ₅)	suatu kewajiban dari perantara yang memegang amanah untuk dapat memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan serta	1. rencana strategis, 2. rencana kinerja, 3. pengukuran kinerja, 4. evaluasi kinerja dan

	mengungkapkan semua kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemberi amanah (Mardiasmo, 2018)	5. analisis akuntabilitas kinerja. (Jatmiko, 2020)
Kinerja pemerintah daerah (Y)	kinerja merupakan suatu pencapaian administrasi suatu program atau kebijakan dalam merealisasikan sasaran, tujuan, misi dan misi suatu organisasi. Menurut Bastian (2006) dalam jurnal Rizal, dan Prabowo (2017)	1. Skor 0,00-0,99 (rendah), 2. Skor 1,00-1,99 (sedang), 3. Skor 2,00-2,99 (tinggi) dan 4) Skor 3,00-4,00 (sangat tinggi)(Harumiati dan Payamta, 2014).

Sumber : Bahan olah peneliti, 2022.

Teknik analisis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel. Dengan menggunakan bantuan Eviews untuk mengolah data statistik maupun data ekonometrika dan dapat menyelesaikan masalah-masalah dalam bentuk *time series, cross section* (Wiranto, 2011).

Model persamaan umum regresi data panel dalam penelitian ini adalah :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \beta_5 X_{5it} + \beta_6 X_{6it} + e$$

Keterangan:

- Y = Kinerja Pemerintah Daerah
- α = Konstanta
- β_1 = koefisien variabel Ukuran daerah
- β_2 = koefisien variabel Tingkat kekayaan daerah
- β_3 = koefisien variabel Tingkat ketergantungan daerah
- β_4 = koefisien variabel Belanja modal
- β_5 = koefisien Akuntabilitas
- β_6 = koefisien Transparansi
- X₁ = Ukuran daerah
- X₂ = Tingkat kekayaan daerah
- X₃ = Tingkat ketergantungan daerah
- X₄ = Belanja modal
- X₅ = Akuntabilitas
- X₆ = Transparansi
- i = Individu ke- i
- t = Waktu ke-t
- e = error

HASIL

Hasil data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapatkan melalui www.bpk.go.id dan www.kemendagri. Berikut merupakan nama-nama pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan yang akan digunakan sebagai sampel.

Tabel 3 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

No	Nama Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	No	Nama Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
1.	Kabupaten Banyuasin	9.	Kabupaten Ogan Komering Ilir
2.	Kabupaten Empat Lawang	10.	Kabupaten Ogan Komering Ulu
3.	Kota Lahat	11.	Kabupaten Ogan Komering Ulu

4. Kabupaten Lubuk Linggau	12. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
5. Kabupaten Muara Enim	13. Kota Pagar Alam
6. Kabupaten Musi Banyuasin	14. Kota Palembang
7. Kabupaten Musi Rawas	15. Kota Prabumulih
8. Kabupaten Ogan Ilir	

Sumber ; Data olah peneliti 2022

Hasil dari analisis statistik deskriptif dari 15 pemerintah daerah kabupaten/kota secara keseluruhan terdapat pada tabel berikut :

Tabel 4 Hasil Rekapitulasi Analisis deskriptif

	Y	X1	X2	X3	X4	X5
Mean	2.948000	28.64467	0.090098	0.423413	0.243229	0.023751
Median	2.959000	28.65000	0.076000	0.454700	0.249800	0.005000
Maximum	3.199000	30.74000	0.319400	0.532700	0.367800	0.236000
Minimum	2.674000	20.02000	0.027800	0.122800	0.030400	0.000300
Standar Dev.	0.123051	1.439808	0.058327	0.100610	0.60553	0.046888

Sumber : data output Eviews

Berdasarkan tabel 4 diatas, dapat dijelaskan bahwa untuk variabel kinerja pemerintah daerah mempunyai nilai rata-rata sebesar 2,948 dengan standar deviasi 0,123. Pada variabel ukuran daerah nilai rata-rata nya 28,664 dengan nilai standar deviasi 1,439. Untuk variabel tingkat kekayaan daerah nilai rata-rata sebesar 0,090 dan nilai standar deviasi 0,058. Variabel tingkat ketergantungan daerah nilai rata-rata sebesar 0,423, dengan nilai standar deviasi 0,100. Variabel belanja modal mempunyai nilai rata-rata sebesar 0,243, dan nilai standar deviasi 0,060. Dan terakhir variabel akuntabilitas mempunyai nilai rata-rata 0,023, dan nilai standar deviasi 0,046.

Tabel 5 Hasil Uji Regresi Data Panel

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.255303	0.152925	21.28697	0.0000
X ₁	-0.003239	0.004512	-0.717868	0.4771
X ₂	0.274353	0.216018	1.270047	0.2116
X ₃	0.427629	0.169876	2.517296	0.0160
X ₄	-0.193366	0.192019	-1.007015	0.3201
X ₅	0.480896	0.232101	2.071924	0.0449

Sumber : data output Eviews

Dari hasil model estimasi regresi *Common Effect Model* yang ditunjukkan tabel 4.6, maka dapat diperoleh persamaan regresi data panel sebagai berikut:

$$Y = 3,2255303 - 0,003239X_1 + 0,274353X_2 + 0,427629X_3 - 0,193366X_4 + 0,480896X_5$$

Berdasarkan model persamaan diatas, dapat menggambarkan bahwa konstanta mempunyai nilai koefisien 3,2255303, menggambarkan jika ukuran daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan daerah, belanja modal serta akuntabilitas bernilai konstan maka variabel kinerja pemda memiliki nilai positif sebesar 3.2255303. Ukuran daerah mempunyai nilai koefisien negatif -0,003239, tingkat kekayaan daerah mempunyai nilai koefisien positif 0.2474353, tingkat ketergantungan daerah

mempunyai nilai koefisien positif 0,427629, belanja modal koefisien negatif -0,193366, dan akuntabilitas mempunyai nilai koefisien positif 0,480896.

Tabel 6
Hasil Uji Hipotesis

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	Hasil
C	3.255303	0.152925	21.28697	0.0000	
X1	-0.003239	0.004512	-0.717868	0.4771	Ditolak
X2	0.274353	0.216018	1.270047	0.2116	Ditolak
X3	0.427629	0.169876	2.517296	0.0160	Diterima
X4	-0.193366	0.192019	-1.007015	0.3201	Ditolak
X5	0.480896	0.232101	2.071924	0.0449	Diterima

Sumber : data output Eviews

Berdasarkan tabel uji hipotesis, dapat dilihat ukuran daerah, menghasilkan nilai probabilitasnya sebesar 0,4771. Hal ini menunjukkan bahwa nilai probabilitasnya $> 0,05$, sehingga ukuran daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Selanjutnya, tingkat kekayaan daerah, nilai probabilitasnya sebesar 0,2116 menunjukkan bahwa nilai probabilitasnya $> 0,05$, sehingga tingkat kekayaan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Tingkat ketergantungan daerah, menghasilkan nilai probabilitasnya sebesar 0,0160 yang artinya nilai probabilitasnya $< 0,05$, sehingga tingkat ketergantungan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Belanja modal, menghasilkan nilai probabilitasnya sebesar 0,3201 menunjukkan bahwa nilai probabilitasnya $> 0,05$, sehingga belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Akuntabilitas nilai probabilitasnya sebesar 0,0449 menunjukkan bahwa nilai probabilitasnya $< 0,05$, sehingga Akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil uji regresi data panel, untuk hipotesis pertama yakni pengaruh ukuran daerah terhadap kinerja pemerintah daerah, variabel ukuran daerah memperoleh nilai probabilitas sebesar 0,4771 yang mana lebih besar dari 0,05. Jika dilihat dari nilai probabilitasnya, maka hipotesis pertama (H_1) ditolak. Hasilnya menunjukkan bahwa variabel ukuran daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ukuran daerah tidak dapat meningkatkan atau menurunkan kinerja pemerintah daerah. Ukuran daerah berkaitan erat dengan aset yang dimiliki oleh masing-masing pemerintah daerah. Aset ini nantinya akan digunakan untuk mendukung jalannya suatu program kerja yang telah direncanakan demi terciptanya pelayanan yang baik bagi masyarakat. Semakin besar aset pemerintah daerah, semakin besar pula ukuran daerah. Semakin besar ukuran daerah maka semakin besar juga tekanan yang dihadapi. Tekanan yang dihadapi ini, akan membuat pemerintah daerah melakukan pengelolaan aset yang dimiliki secara tepat sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat luas. Hal ini dapat mendorong adanya meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Namun jika dilihat dari hasil penelitian yang telah dilakukan, ukuran daerah tidak mempunyai pengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini bisa terjadi karena ukuran daerah pada suatu pemerintah daerah tidak besar sehingga tidak menghadapi tekanan yang besar. Karena pemerintah daerah tidak menghadapi tekanan

yang besar maka pengelolaan asetnya demi kepentingan masyarakat tidak berjalan secara optimal sehingga ukuran daerah mempengaruhi kinerja pemerintah daerah.

Hasil (H_1) penelitian ini konsisten dengan beberapa penelitian terdahulu oleh Sudarsana dan Rahardjo (2013) dan Harumiati dan Payamta (2014) yakni tidak ditemukan pengaruh ukuran daerah terhadap kinerja pemerintah daerah karena pemerintah daerah belum mampu mengelolah asetnya dengan baik bagi kepentingan masyarakat. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian oleh Artha, dan Basuki (2016) dan Aminah, Afiah dan Pratama (2019) yang menemukan adanya pengaruh positif ukuran daerah terhadap kinerja pemerintah daerah.

Pada hasil uji regresi data panel Hipotesis kedua (H_2), yakni pengaruh tingkat kekayaan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah, variabel tingkat kekayaan daerah memperoleh nilai probabilitas sebesar 0,2116 yang mana lebih besar dari 0,05. Jika dilihat dari nilai probabilitasnya, maka hipotesis kedua (H_2) ditolak karena hasilnya menunjukkan bahwa variabel tingkat kekayaan tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. dari hasil tersebut, ukuran daerah tidak dapat meningkatkan atau menurunkan kinerja pemerintah daerah. Tingkat kekayaan suatu daerah berkaitan erat dengan pendapatan asli daerah. Artinya, pendapatan asli daerah yang diterima pemerintah daerah sangat berpengaruh terhadap peningkatan kekayaan daerah. Pendapatan asli daerah inilah yang nantinya digunakan untuk pembiayaan pembangunan dalam pemerintahan. Semakin besar suatu pendapatan asli daerah maka semakin besar juga harapan dilakukannya pelaksanaan pembangunan yang tepat dan optimal oleh pemerintah daerah. Pelaksanaan pembangunan yang tepat menggunakan pendapatan asli daerah dapat mendorong kinerja suatu pemerintah daerah.

Hasil penelitian (H_2) ini konsisten dengan penelitian Artha, dan Basuki (2016) yang tidak menemukan adanya pengaruh tingkat kekayaan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. Dan penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian Sudarsana dan Rahardjo (2013) yang menyatakan bahwa tingkat kekayaan daerah mempunyai pengaruh yang positif signifikan terhadap kinerja pemda. Hal ini terjadi karena pemerintah daerah tersebut mempunyai tingkat kekayaan yang besar. Pemerintah daerah yang mempunyai kekayaan yang besar akan dituntut untuk mengelolah dan memanfaatkan kekayaan secara optimal sehingga akan berdampak pada kinerja pemerintah daerah.

Hasil regresi data panel untuk Hipotesis ketiga (H_3) yakni pengaruh tingkat ketergantungan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah, untuk variabel tingkat ketergantungan daerah nilai probabilitas sebesar 0,0160 yang mana lebih kecil dari 0,05. Jika dilihat dari nilai probabilitasnya, maka hipotesis ketiga (H_3) diterima karena hasilnya menunjukkan bahwa variabel tingkat ketergantungan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tingkat ketergantungan daerah dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Hasil (H_3) penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Amyulianthy, Khair, dan Lysandra (2016) yang menemukan adanya pengaruh positif tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap kinerja pemda. Namun, hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian Sudarsana dan Rahardjo (2013) yang tidak menemukan adanya pengaruh dari tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap kinerja pemda.

Untuk hipotesis keempat (H_4), yakni pengaruh belanja modal terhadap kinerja pemerintah daerah, untuk variabel belanja modal memperoleh nilai probabilitas sebesar 0,3201 yang mana lebih besar dari 0,05. Jika dilihat dari nilai probabilitasnya, maka hipotesis keempat (H_4) ditolak, karena hasilnya menunjukkan bahwa variabel belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa belanja modal tidak dapat meningkatkan atau menurunkan kinerja

pemerintah daerah. Pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dapat tercermin dari belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah. Semakin baik dampak pembangunan terhadap masyarakat, maka semakin optimalnya penggunaan belanja modal tersebut. Penggunaan belanja modal yang optimal dapat berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Namun penjelasan sebelumnya tidak mendukung hasil penelitian ini.

Hasil (H_4) penelitian ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Dewata, Jauhari, Aprianti, dan Hijria (2018) yang tidak menemukan adanya pengaruh belanja modal terhadap kinerja pemerintah daerah. menyatakan bahwa belanja modal tidak mempunyai pengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Tetapi, bertentangan dengan hasil penelitian dari Aminah, Afiah dan Pratama (2019) yang berpendapat bahwa belanja modal dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah karena mutu yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan, jumlah yang diperoleh sesuai dengan yang dibutuhkan serta pelaksanaan kegiatan belanja modal tepat waktu sehingga mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah.

Hipotesis kelima (H_5) yakni pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah daerah, untuk variabel akuntabilitas memperoleh nilai probabilitas sebesar 0,0449 yang mana lebih kecil dari 0,05. Jika dilihat dari nilai probabilitasnya, maka hipotesis kelima (H_5) diterima karena hasilnya menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa akuntabilitas dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan Wiguna, Yuniartha, dan Darmawan (2015) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Keterbatasan dalam penelitian ini hanya menggunakan empat karakteristik dari pemerintah daerah sebagai variabel independen, terbatas pada pemerintah daerah kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan dan periode penelitian hanya lima tahun. Periode penelitian yang lebih panjang akan memperoleh hasil yang lebih akurat. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah untuk penambahan karakteristik pemerintah daerah sebagai variabel independen seperti tingkat kesejahteraan, umur daerah, diferensiasi fungsional, *leverage daerah*, *intergovernment revenue* dan lain sebagainya. Selain itu dapat memperluas area penelitian dengan menambah pemerintah daerah kabupaten/kota diluar Provinsi Sumatera Selatan sebagai objek penelitian, dan dengan menggunakan periode penelitian yang lebih panjang agar diperoleh data yang lebih banyak dengan hasil yang lebih akurat.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa ukuran daerah, tingkat kekayaan daerah dan belanja modal tidak mempunyai pengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Tingkat kekayaan daerah dan belanja modal tidak dapat mempengaruhi kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan tahun 2016-2020. Tingkat ketergantungan daerah serta akuntabilitas memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Tingkat ketergantungan daerah dan akuntabilitas dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016-2020.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih pada Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang mendukung pendanaan terhadap penelitian ini, yakni Penelitian Sains, Teknologi dan Seni dengan SK Dekan Fakultas Nomor 1452/UN9.FE/TU.SK/2022.

REFERENSI

- Afrian, G., Surya, R. A. S., Silfi, A. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Temuan Audit Dan Leverage Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau* 3(1): 1036–50. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/view/10713>
- Aminah, I. N., Afiah, N. N., Pratama. A. (2019). Pengaruh Size, Wealth, Intergovernmental Revenue Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)* 3(2): 147. <http://jurnal.usbykpk.ac.id/index.php/sikap>.
DOI: <https://doi.org/10.32897/jsikap.v3i2.137>
- Amyulianthy, R., Khair, J., Lysandra. S. (2016). Characteristics and Political Connection To Local Government Performance. *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, 8(2): 1–14. <http://ejournal.upi.edu/index.php/aset>. DOI: <https://doi.org/10.17509/jaset.v8i2.12527>
- Andani, M., Sarwani, S., Respati, N. W. (2019). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Opini Audit Terhadap Kinerja Pemerintah Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi* 9(2): 111–30. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.9.2.111-130>
- Ara, S. C., Herwanti, T., Pituringsih. E. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemda Dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemda Kabupaten Di Pulau Sumba. *Journal of Auditing, Finance, and Forensic Accounting* 4(1): 1. DOI: <https://doi.org/10.21107/jaffa.v4i1.1878>
- Armaja, A., Ibrahim, R., Aliamin. A. (2017). Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 3(2): 168–81. DOI: <https://doi.org/10.24815/jped.v3i2.8229>
- Artha, R. D., Basuki, P., MT,A.(2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan BPK Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi NTB). *InFestasi* 11(2): 214. DOI: <https://doi.org/10.21107/infestasi.v11i2.1133>
- Dewata, E., Jauhari,H., Aprianti, S., Hijria, E. N. (2018). The Effects of Local Government Characteristics and Audit Opinion on the Performance of District and City Governments in Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis* 5(2): 151–62. <http://dx.doi.org/10.24815/jab.v5i2.9057>
- Harumiati, Y., Payamta, P. (2014). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia Tahun Anggaran 2011. *Assets: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan* 3(2): 84. DOI: <http://doi.org/10.25273/jap.v3i2.1244>
- Henda, R. S., Aulia.B. (2017). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penentuan Opini Pada LKPD Sumsel Berdasarkan Penerapan SAP. *Jurnal Teori dan Riset Administrasi Publik* 1(1).
- Henda, R. S., Nurullah, A., Burhanuddin, B., HS, R.A. (2020). The Influence of Opinion Audit on Score of Regional Government Performance In South Sumatera. *Jurnal AKUNTANSI* 8(2). DOI: <https://doi.org/10.26460/ja.v8i2.1326>

- Maiyora, G. (2015). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Studi Empiris Kabupaten/Kota Di Pulau Sumatera). *JOMFekom* 2(2).
- Mardiasmo. 2018. *Akutansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Noviyanti, N. A., Kiswanto. K. (2017). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Accounting Analysis Journal* 12(3): 234–47. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj>. <https://doi.org/10.15294/aaj.v5i1.9759>
- Pemerintah Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*.
- Pemerintah Indonesia. 2019. *Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*.
- Pemerintah Indonesia. 2010. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010*.
- Primadiva, P.P., Rosdini, D., Mulyani, S. (2021). Pengaruh tingkat kekayaan dan tingkat ketergantungan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. *Jurnal Paradigma Ekonomika* Vol.16. No.2. file:///C:/Users/Toshiba/Downloads/11999-Article%20Text-34222-1-10-20210421.pdf
- Rizal, Q., Prabowo, T. J. W. (2017). “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Pemeriksaan BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia Tahun Anggaran 2012.” *Diponegoro Journal of Accounting* 6(1): 1–13. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>.
- Utama, Fikri. R., Evana, E., Gamayuni, R. R. (2019). The Effect of Local Government Characteristics on Performance of Local Government Administration. *International Research Journal of Business Studies* 12(2): 197–208. <http://doi.org/10.21632/irjs>
- Sudarsana, H. S., Rahardjo, S. N. (2013). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Influence of Characteristics of Government Regional and Findings Audit of Performance Government Area). *Diponegoro Journal Of Accounting* 2(4): 1–13. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>.
- Wiguna, M. B. S., Yuniartha, G. A., Darmawan. N. A. S. (2015). Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng. *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha* Vol. 3(No. 1): 1–12.
- Winarto, W. W. (2011). *Analisis Dan Statistika Dengan Eviews*. Yogyakarta: STM TKPN